

Penataan kawasan kumuh merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk memberikan masyarakat terdampak hunian baru yang lebih layak baik dari aspek fisik bangunan maupun secara sosial ekonomi. Di Jakarta, penataan kawasan sering kali dilakukan dengan faktor yang beragam dengan umumnya untuk mengembalikan ruang sebagaimana peruntukannya ataupun karena faktor kebencanaan dengan metode seperti relokasi dan juga revitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan menilai kebijakan penataan kawasan yang mana yang secara keseluruhan lebih baik antara metode relokasi dengan metode revitalisasi pada masa dua rezim gubernur DKI Jakarta yang berbeda dalam memberikan masyarakat hunian yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mewawancarai *stakeholder* terkait dan juga masyarakat terdampak. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa metode revitalisasi lebih bisa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam perihal penyediaan hunian layak dibandingkan metode relokasi disamping terdapat juga pengaruh bagaimana langkah pendekatan pemerintah terhadap masyarakat. Proses pendekatan pemerintah dan juga metode yang lebih bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dan tidak merubah kebiasaan masyarakat memberikan *output* tingkat kepuasan dan kenyamanan masyarakat hidup di lingkungan yang baru.

Kata Kunci: penataan kawasan, hunian layak, relokasi, revitalisasi, pendekatan pemerintah

ABSTRACT

The arrangement of slum areas is an effort carried out by the government with the aim of providing affected communities with new housing that is more appropriate both from the physical aspect of the building and socio-economically. In Jakarta, regional planning is often carried out for various factors, generally to restore space to its intended purpose or due to disaster factors using methods such as relocation and revitalization. This research aims to compare and assess which regional planning policy is better overall between the relocation method and the revitalization method during the two different DKI Jakarta governor regimes in providing better residential communities. The method used in this research is a qualitative method by interviewing relevant stakeholders and also affected communities. The results of this research show that the revitalization method is better able to accommodate community needs in terms of providing adequate housing compared to the relocation method, as well as the influence of how the government approaches the community. The government's approach process and also methods that can better accommodate people's needs and do not change people's habits provide output levels of satisfaction and comfort for people living in a new environment.

Keywords: area arrangement, decent housing, relocation, revitalization, government approach